

Daftar Isi

Pengantar Editor

Hendardi dan Hak Sipil-Politik

ix

BAGIAN I

HAK SIPIL, KEBEBASAN PERS, DAN HAK MENYATAKAN PENDAPAT

1

• Problem Komunikasi Politik Indonesia	3
• Pengadilan Mahasiswa	6
• Demo dan Politik Mahasiswa	9
• Aparat Perizinan dan Pemberitahuan	12
• Perizinan Regulasi Atas Masyarakat	17
• Perizinan dan Strategi Legalistik	21
• Politik Perizinan dari Zaman Belanda hingga Orde Baru	25
• Sekat-sekat Perizinan	29
• Perizinan dan Pemberitahuan	32
• Izin di Benak Kita	36
• Harapan Masyarakat Pembaca	39
• Pers di Jalur Hukum	44
• Regulasi Perizinan	48
• Pers Negara	51
• Politik Kependudukan dan Operasi Yustisi	54

• Pers dan Komunikasi Publik	58
• Kontroversi Putusan PKMA	63
• Demo Kontra Demo	68
• Proyeksi Hak Sipil dan Politik 1997	72
• Pers, Intelektual, dan Demokrasi	78
• Pers dan Pola Pikir Asing	84
• Razia Penduduk dan Kekerasan pada Tersangka	88
• Menghukum Perbedaan Pendapat	92
• Penyiksaan dalam Tahanan	96
• Hukum di Indonesia Berbeda dengan Negeri Penganut Sistem <i>Anglo-Saxon</i>	100
• Dialog Menyisihkan yang Tabu	103
• Politik dan KTP	108
• Politik Buku	111

BAGIAN II

PERBURUHAN SERTA HAK BERSERIKAT DAN BERKUMPUL

• Bila Polisi Membubarkan Seminar Ilmiah	117
• Analisis Kebijakan UMR Baru (1)	119
• UMR Naik, Upah Riil Merosot	124
• Analisis Kebijakan UMR Baru (2)	127
• UMR, Katup Pengaman dan Kedaluwarsa	131
• Kenaikan UMR: Menaker, SPSI, dan Apindo	135
• Rekomendasi Pencabutan UU Subversi	140
• UU Subversi dan Politik	145
• UMR, Nasib Buruh, dan FSPSI	148
• Aksi Pekerja Berdasi	152
• Pemogokan dan PHK di Hongkong Bank	157
• UU Subversi, Politik, dan HAM	161
• Buruh dan Upah	167
• Wawasan dan Keselamatan Kerja	171
• Kenaikan UMR Dilindas Inflasi	175
• Posisi Lemah TKW Kita	179
	183

• Likuidasi Bank dan Hak Pekerja	187
• Signifikansi Hak Berorganisasi	192

BAGIAN III

KONFLIK MASSA DAN KOMUNAL

• Kekerasan dan Keberingasan Massa	197
• Mengapa Massa Mengamuk?	199
• Kerusuhan Massa	204
• Demo Tandingan	208
• Massa Mengambang, Massa Mengamuk?	212
• Menyikapi Ide Pembentukan Pos Kewaspadaan Nasional	216
• Pijakan Hukum Posko Kewaspadaan	220
• Memahami Perilaku Massa	224
• Massa Amuk, Sekali Lagi (Untuk Laode Ida)	227
• Kerusuhan dan Politik Kekerasan	233
• Timor Timur dan Penyelesaiannya	237
• Fajar di Timor Timur	243
• Belum Saatnya Menerapkan Undang-Undang PKB	246
• Perlu, Komisi Pengawasan Darurat Sipil	249
• Militer di Konflik Maluku	254
• Masalah Kesenjangan dan Kerusuhan	258
	260

BAGIAN IV

MEMAJUKAN TOLERANSI, MENANGKAL RADIKALISME

• Beragama, Kebebasan Dasar	265
• Dialog yang Demokratis	267
• Dialog demi Kepentingan Bangsa	271
• Politik Rasialis	275
• Kekerasan Rasial: Perspektif HAM	279
• Taktik Kekacauan	284
• Indonesia yang Toleran	289
	293

- Pluralisme dan Negara 295
- Jokowi-JK, Harapan Baru Perlindungan Kebebasan Beragama 299
- Korporatisme Negara 302
- Mantra Tumpul Deradikalisasi 306
- TNI dan RUU Anti-Terorisme 310

Indeks 315

Tentang Penulis 325